

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA SISTEM *MARKEPLACE DAN DIGITAL PAYMENT* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan *Digipay* dalam rangka penggunaan uang persediaan, perlu menetapkan pengguna dan kewenangan pengguna sistem *marketplace*;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui *Digipay* pada Satker Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Pejabat Pengguna Sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Sistem *Marketplace* Dan *Digital Payment* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satker Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA SISTEM *MARKETPLACE* DAN *DIGITAL PAYMENT* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengguna Sistem *Marketplace* Dan *Digital Payment* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengguna Sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 327 tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA SISTEM
MARKETPLACE DAN *DIGITAL PAYMENT* PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SUSUNAN PEJABAT PENGGUNA SISTEM *MARKETPLACE* DAN *DIGITAL PAYMENT*
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

No (1)	NAMA/NIP (2)	DITUNJUK DALAM JABATAN (3)	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG (4)
1.	Dimas Nizar Fahrobi NIP.198805042025211006	Admin Satker	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pendaftaran user Pejabat/Staf yang terlibat di sistem <i>marketplace</i>.2. Dapat dirangkap oleh Pejabat Pengadaan (PP)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Bendahara Pengeluaran

No	NAMA/NIP	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
2.	Andika Teguh Prasetyo NIP.198502182010121006	Pejabat Pembuat Komitmen	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima barang/ jasa;2. Melakukan pengembalian permintaan barang/ jasa dalam hal PPK berhalangan karena tidak masuk kantor/cuti/alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang menyetujui pengajuan permintaan barang/jasa;3. Melakukan review permintaan barang/jasa;4. Melakukan verifikasi dan persetujuan pembebaan anggaran;5. Menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa ke Penyedia Barang/Jasa;6. Menyetujui pergantian Penyedia Barang/Jasa dalam hal Penyedia awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang diminta;7. Menyetujui penggantian barang/jasa dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia;8. Menyetujui/menolak barang/jasa pengganti jika harga barang/jasa pengganti lebih tinggi dari harga awal

No	NAMA/NIP	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
			<p>barang/jasa yang diminta;</p> <p>9. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari Pejabat Pengadaan;</p> <p>10. Menandatangani dokumen serah terima barang/jasa; dan</p> <p>11. Menerbitkan Surat Perintah Bayar atas tagihan pembayaran yang dibebankan pada UP KKP dan UP Tunai.</p>
3.	Fuji Aris Sandhi NIP.19871112010121006	Pejabat Pengadaan	<p>1. Menerima penugasan pengadaan barang/ jasa dari PPK;</p> <p>2. Melakukan Pengadaan barang/jasa dan negosiasi harga ke Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>3. Mencari Penyedia Barang/Jasa pengganti dalam hal Penyedia Barang/Jasa awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang dipesan;</p> <p>4. Mencari barang/jasa pengganti dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia;</p> <p>5. Melakukan pemilihan sistem pembayaran elektronik;</p> <p>6. Membebankan pembayaran pada KKP; dan</p>

No	NAMA/NIP	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
			<p>7. Memproses dokumen tagihan pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa yang telah disampaikan oleh Penerima Barang/Jasa atau Staff PPK untuk disampaikan kepada PPK.</p>
4.	Faiz Ridho Nugroho NIP.199603292020121005	Bendahara Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima dokumen tagihan pembayaran atas beban UP dari PPK;2. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas;3. Melakukan pembayaran ke Penyedia Badang/Jasa berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK; dan4. Melakukan penyetoran pajak;

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayuh Ngabekti

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI